

MANAJEMEN STRATEGI PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEBAGAI BIDANG GARAP MANAJEMEN PENDIDIKAN

Dwi Yuliasuti, Didi Supriadi, Rejokirono
SD Negeri 3 Brosot, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa
dwiyuli894@gmail.com, didi.supriadi@ustjogja.ac.id, rejokirono@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

Financing management is the core of financial activities which plays a central role in ensuring operational continuity and sustainable growth of an organization. In an era of growing economic uncertainty, companies, public entities, and even individuals need to have a solid understanding of effective financing strategies. This chapter aims to provide a comprehensive understanding of the strategies, techniques, and tools necessary to manage financial resources wisely. The research was carried out using library research so the method used in the research was literature study. Financing management is very important, starting from financial risk management, and capital budgeting, to long and short-term financing strategies.

Keywords : strategic management, financial management, educational management, financing

ABSTRAK

Manajemen pembiayaan merupakan inti dari aktivitas keuangan yang memegang peran sentral dalam memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi. Dalam era ketidakpastian ekonomi yang terus berkembang, penting bagi perusahaan, entitas publik, dan bahkan individu untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang strategi pembiayaan yang efektif. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, teknik, dan alat yang diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan dengan bijak. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Manajemen pembiayaan menjadi hal yang sangat penting mulai dari pengelolaan risiko keuangan, penganggaran modal, hingga strategi pembiayaan jangka panjang dan pendek.

Kata kunci: manajemen strategi, pembiayaan pendidikan, manajemen pendidikan

A. Pendahuluan

Manajemen pembiayaan merupakan inti dari aktivitas keuangan yang memegang peran sentral dalam memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi. Dalam era ketidakpastian ekonomi yang terus berkembang, penting bagi

pendidikan, perusahaan, entitas publik, dan bahkan individu untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang strategi pembiayaan yang efektif. Pada book chapter bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, teknik, dan alat yang diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan

dengan bijak.

Dengan perubahan dinamis dalam lingkungan ekonomi global, tantangan yang dihadapi oleh para manajer keuangan semakin kompleks. Oleh karena itu, bab ini akan membahas berbagai aspek penting dari manajemen pembiayaan, mulai dari pengelolaan risiko keuangan, penganggaran modal, hingga strategi pembiayaan jangka panjang dan pendek. Teknologi berperan penting dalam membentuk lanskap manajemen pembiayaan modern, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan keuangan yang cerdas.

Dalam dunia pendidikan terdapat pengelolaan pembiayaan pendidikan karena pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya sebuah lembaga pendidikan di masa sekarang yang dalam hal ini pemerintah juga mengaturnya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan .Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pada pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 3 (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan.

Dalam pengelolaan pendidikan, pembiayaan adalah salah satu dari berbagai sumber daya yang mendukung secara langsung keefektifan serta koefisiennya. Sekolah dituntut untuk dapat mengelola data dengan transparan yaitu dengan merencanakan, mengaplikasikan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya. Pada

pelaksanaan pendidikan diantara unsur yang sangat urgen yaitu adanya pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan haruslah dikelola secara optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas dari pendidik itu sesuai dengan harapan. Karenanya perlu menjadikan perhatian yang lebih terhadap strategi pembiayaan pendidikan, yang mana dapat menjadi perhatian utama dalam pembiayaan adalah pendapatan yang diperoleh dari dana APBN, APBD, masyarakat atau orang tua.

Menurut Maretsya Soegiarto dan Heriyanto strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi pembiayaan meliputi strategi perencanaan (pelaksanaan gagasan), pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan pada lembaga formal, diawali dengan disusunnya Visi dan Misi Sekolah, strategi perencanaan dan penyusunan RAPBS dilaksanakan melalui analisis SWOT sederhana Strategi perencanaan pembiayaan sekolah merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal suatu perusahaan/ lembaga termasuk sekolah. Selain itu hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan. (prayoga & risnandi, 2019)

Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, supaya efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini, kemampuan pengelola pembiayaan sekolah dalam

menentukan strategi menjadi faktor penting. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. (Suherman, 2019)

B. Metode penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data data sekunder yang digunakan (Snyder, 2019).

Menurut Mestika Zed (2023) studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis:1999).

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir: 1988).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Prayoga dan Arif Risnandi menyebutkan bahwa Pertama perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun RKAS yaitu Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah oleh Kepala Sekolah, bendahara, dewan guru dan komite sekolah sesuai format kemudian dilakukan pengajuan anggaran seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. Dalam strategi pembiayaan, Kegiatan penentuan kebutuhan pembiayaan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh madrasah. Keputusan itu menyangkut pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan pembiayaan dibuat dalam sebuah kerangka perencanaan pelayanan dan finansial yang terintegrasi dalam konteks kebijakan madrasah sebagai acuan prioritas alokasi pembiayaan madrasah. Berikut Rencana Anggaran di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang. Ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternative dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran pembiayaan madrasah. Ketiga untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel*

madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan biayadari peserta didik, pemeliharaan biaya sarana prasarana dilakukan kurun waktu satu kali dalam satu semester sehingga memperkecil kemungkinan kerusakan dan penghapusan dari sarana prasarana tersendiri dan penghapusan yang sifatnya sudah tidak dapat di perbaiki. Keempat evaluasi dilakukan oleh sekolah melibatkan aktivitas sekolah baik bendahara sekolah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan pembiayaan. Bentuk laporan pembiayaan dituangkan dalam pelaporan BPMU untuk kemudian dilaporkan kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. Rapat internal evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan pada akhir semester di madrasah dengan mekanisme pelaporan dari bendahara baik secara teknis laporan buku besar yang meliputi, pemasukan, pengelolaan, pembayaran, pengeluaran madrasah. (prayoga & risnandi, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Agustian Ramadana Putera, Lisda Aisyah, Misnasanti, Ainun Mahfuzah, dan Syahrial Shaddiq menyimpulkan bahwa lembaga kursus yang menjadi subjek penelitian ini memiliki struktur kepengurusan yang baik dan berjalan berdasarkan pengelolaan yang dilakukan. Lembaga ini telah berjalan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, alokasi, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara serius oleh tim instansi. Kind English Course Institute

melakukan perencanaan yang diawali dengan perencanaan dengan tujuan dan rencana anggaran yang akan digunakan selama 1 periode. Pada pertemuan ini pengurus dan pendiri lembaga, bendahara, dan tata usaha terlibat di lapangan. Prioritas dalam menentukan RAPBN adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran seperti membeli kamus, membayar kontrak, membeli kaos, dan media lainnya seperti media pembelajaran. Semuanya dilakukan berdasarkan manajemen yang dilakukan. Dalam fungsi peruntukan dan pembukuan yang dilakukan harus dicatat dalam buku khusus dan semua pengelolaan dilakukan dengan pengelolaan keuangan yang efektif karena tanggung jawab antara lembaga dan individu merupakan sistem organisasi manajemen karena lembaga tersebut milik swasta.

Penelitian yang dilakukan Jajang Suherman menyimpulkan bahwa strategi pembiayaan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yaitu menerapkan strategi WO atau mendukung strategi *defensive* yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Dengan kata lain Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia menggunakan jumlah SDM dan biaya terbatas secara maksimal dengan menggunakan dana yang dimiliki serta memanfaatkan peran yayasan, orang tua, dan alumni. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen dan merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yang meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masayang akan datang, dalam hal memvisualisasi serta merumuskan

aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. (Suherman, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Budaya menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota serta propinsi maupun masyarakat dan dunia usaha. Pembiayaan pendidikan direncanakan berdasarkan pada kebutuhan sekolah sesuai dengan skala prioritas yang meliputi: gaji guru, gaji pegawai, kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, pembiayaan sarana dan prasarana dan peningkatan potensi siswa dan guru. Perwujudan pembiayaan pendidikan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa terutama menghadapi ujian akhir nasional. Untuk di luar proses belajar mengajar diberikan pengembangan bakat dan minat siswa yang didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal. Berdasarkan hasil pemaparan data dan temuan penelitian serta pembahasan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Perumusan penyusunan pembiayaan sekolah yang dalam hal ini RAPBS dilakukan melalui analisis kebutuhan operasional sekolah, baik yang terkait pada penyelenggaraan proses belajar mengajar maupun penunjang lainnya. Penyusunan RAPBS berpedoman kepada visi, misi, tujuan dan strategi yang telah dicanangkan oleh sekolah, yaitu kepala sekolah, guru (pendidik) dan

tenaga kependidikan. Pelaksanaan dalam mengupayakan pendapatan dan mengatur belanja sekolah. Pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah diupayakan dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah daerah, yayasan dan dari masyarakat. Strategi yang ditempuh sekolah untuk menggalang pendanaan dari masyarakat melalui wali murid dan dunia usaha. Pelaksanaan dalam melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh sekolah secara rutin baik tiap semester maupun tahun pelajaran. Setiap personel sekolah diwajibkan untuk memberikan komentar dan masukan setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sekolah. Pelaksanaan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan pihak sekolah antara lain menyusun laporan akhir program yang diberikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholdernya. Laporan pemanfaatan pembiayaan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi. (Budaya, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Diana Kosasih dan Wati Karmila menyimpulkan bahwa Peran kepala sekolah dalam perencanaan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTs Nanjungmekar Rancaekek Bandung mempergunakan pembiayaan pendidikan sesuai dengan dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan

pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Teknik Pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah akan mengutamakan hal-hal yang paling *vital* yang diperlukan oleh organisasi sekolah, sehingga biaya tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada MTs Nanjungmekar Rancaekek Bandung. Pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan intern dan ekstern. Secara intern dilakukan oleh kemenag kabupaten atau provinsi, ekstern dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat serta berbagai pihak-pihak yang berwenang. Hambatan yang dialami dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan terbagi kepada dua permasalahan, yaitu yang pertama berbedanya perencanaan dengan biaya yang diterima dari pemerintah, yang kedua adanya tuntutan dari pihak-pihak lain yang seharusnya tidak dibebankan kepada pembiayaan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Durotun Nafisah, Widiyanto, dan Wijang Sakitri, menyimpulkan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. (2) Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. (3) Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. (4) Untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. Penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Proses penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dimulai dengan mengadakan rapat pleno,

mengidentifikasi sumber penerimaan madrasah, mengidentifikasi pengeluaran madrasah, menyusun RAPBM, mengusulkan RAPBM, melakukan revisi RAPBM, hingga pada tahap pengesahan RAPBM. Pembukuan-pembukuan akuntansi yang digunakan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih dalam proses pencatatan keuangan adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan serta buku tabungan. Proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dimulai dengan menjadikan RAPBM sebagai standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan, oleh pihak internal dan pihak eksternal, mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan hingga pada tahap penemuan solusi untuk penyimpangan yang telah yang telah ditemukan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga publik, dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh MA Ribhul Ulum yaitu dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan, hingga pengesahan laporan pertanggungjawaban tersebut. Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diharapkan madrasah mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Dirgahayu Ari Astuti menyimpulkan bahwa penelitian studi manajemen sarana dan prasarana PKBM *Homeschooling* HSPG Solo. Menyadari sarana dan prasarana

sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan, untuk itu dalam tata kelola sarana dan prasarana PKBM *Homeschooling* HSPG Solo mengikuti kerangka fungsi manajemen pendidikan luar sekolah. Kerangka fungsi manajemen pendidikan luar sekolah terdiri atas enam fungsi yang berurutan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Implementasi manajemen sarana dan prasarana di PKBM *Homeschooling* HSPG Solo diterapkan dalam pengadaan sarana dan prasarana laboratorium komputer tahun 2021 sebagai penunjang kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan penelitian menerapkan studi manajemen sarana dan prasarana ekstrakurikuler komputer pada tahun 2021 PKBM *Homeschooling* HSPG Solo. Metode implementasi sarana dan prasarana PKBM *Homeschooling* HSPG Solo mengikuti kerangka fungsi manajemen pendidikan luar sekolah. Kerangka fungsi manajemen pendidikan luar sekolah terdiri atas enam fungsi yang berurutan. Keenam fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Hasil penelitian dimulai dengan kegiatan evaluasi sistematis, sasaran yang dievaluasi adalah perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak program materi pengembangan diri sesuai kebutuhan minat dan bakat siswa PKBM *Homeschooling* HSPG Solo.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Diana Putri Kosasih dan Wati Karmila menyimpulkan bahwa Peran kepala sekolah dalam perencanaan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTs Nanjungmekar Rancaekek Bandung mempergunakan pembiayaan

pendidikan sesuai dengan dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Teknik Pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah akan mengutamakan hal-hal yang paling *vital* yang diperlukan oleh organisasi sekolah, sehingga biaya tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada MTs Nanjungmekar Rancaekek Bandung. Pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan intern dan ektern. Secara intern dilakukan oleh kemenag kabupaten atau provinsi, sedangkan dari pihak ektern dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat serta berbagai pihak-pihak yang berwenang. Hambatan yang dialami dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan terbagi kepada dua permasalahan, yaitu yang pertama berbedanya perencanaan dengan biaya yang diterima dari pemerintah, yang kedua adanya tuntutan dari pihak-pihak lain yang seharusnya tidak dibebankan kepada pembiayaan pendidikan. Kepala sekolah merupakan kunci penentu berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan, demikian pula halnya dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan tergantung kepada kemampuan seorang pemimpin pada suatu lembaga pendidikan oleh karenanya, diharapkan kepada kepala sekolah MTs Nanjungmekar Rancaekek Bandung untuk dapat melaksanakan perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang terhadap sumber dana pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan perencanaan

tersebut penggunaan sumber dana pembiayaan pendidikan akan tepat sasaran. Guru sebagai bagian dari komponen pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai peran yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas guru. Oleh karenanya diharapkan pengalokasian sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTs Nanjungmekar Rancaekek Bandung dengan mengikutsertakan guru sehingga pengalokasian pembiayaan pendidikan akan berpengaruh terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan. Bendahara sebagai komponen yang paling penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dituntut mempunyai keahlian dan kejujuran dalam penggunaan pembiayaan pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten, hal ini akan mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan penggunaan sumber pembiayaan sekolah. Dengan adanya pengawasan maka akan terjadi penggunaan uang secara tepat sebagaimana yang diperlukan oleh sekolah. dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di Nanjungmekar Rancaekek Bandung. Kepala dinas sebagai bagian dari penentu kebijakan tentang sistem penggunaan pembiayaan pendidikan mempunyai tugas yang vital terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini tidak terlepas dari beberapa hambatan terjadi pada sekolah, dalam pengertian kurang senangnya pihak sekolah terhadap kebijakan yang dilakukan oleh dinas, oleh karena itu pihak terkait diharapkan

mampu membuat program pengawasan terhadap keuangan yang ada pada setiap sekolah. (Kosasih & Karmila, 2019).

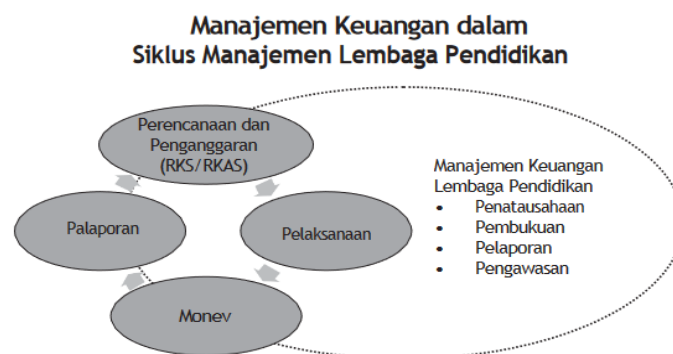
Berdasarkan hasil penelitian Endang Tri Ekowati, Sunandar, Ngurah Ayu Nyoman menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: SD Islam Ar Rahmah merupakan sekolah swasta yang baru berdiri sejak 2008 atau sepuluh tahun yang lalu, namun prestasi SD ini sangat menonjol dan didukung oleh manajemen yang profesional, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Proses perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh yaitu Rapat Kerja Tahunan, membuat draft anggaran sesuai tupoksinya, diajukan ke Yayasan untuk disetujui, pembuatan proposal, diajukan kembali ke Yayasan. Dalam proses penyusunan anggaran masih ada ditemukan guru yang menyusun anggaran sesuai tupoksinya yang hanya ulangan dari anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya memang karena kepala sekolah dan yayasan sangat selektif dalam menerima usulan program atau belanja modal baru yang bernilai investasi tinggi. Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana itu sendiri. Sumber pembiayaan pendidikan SD Islam Ar Rahmah Suruh diperoleh dari beberapa sumber, yaitu; (1) sumber dana yang berasal dari masyarakat seperti, iuran bantuan dana/hibah; dan (2) sumber dana yang Pelaksanaan Anggaran di SD Islam Ar Rahmah Suruh digunakan untuk pembiayaan program sekolah serta belanja barang dan jasa. Program sekolah yang membutuhkan dana adalah untuk berbagai macam pengembangan, seperti pengembangan kompetensi

lulusan, K13, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, penggalan SDM, seperti pendelegasian guru dalam berbagai acara yang menunjang SDM, seperti pelatihan-pelatihan, seminar, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran untuk belanja barang dan jasa adalah untuk membiayai kebutuhan seperti, kegiatan kurikulum, kesiswaan, kepramukaan, rumah tangga, dan untuk mendukung pembelajaran siswa. Pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah dilakukan oleh yayasan Ar Rahmah Suruh dan dinas kependidikan. Kemudian, pertanggungjawaban pembiayaan sekolah diserahkan kepada Komite Sekolah, Yayasan Ar Rahmah, dan dinas pendidikan. Manajemen keuangan di SD Islam Ar Rahmah Suruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan disusun secara sistematis, mulai dari pengajuan anggaran ke Yayasan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana yang sesuai dengan RKAS, kemudian adanya laporan kendali, yang dikendalikan secara langsung oleh kepala sekolah, hanya saja kegiatannya dilakukan oleh bendahara. Dalam

pelaksanaan kegiatan keuangan, SD Islam Ar Rahmah Suruh mengacu pada standar peningkatan kualitas sekolah dan berkorelasi positif pada kualitas pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya prestasi yang raih oleh siswa-siswi SD Islam Ar Rahmah Suruh baik dalam bidang akademik maupun non akademik, kompetensi tenaga pengajar yang baik dan keadaan sarana dan prasaran yang menunjang kegiatan operasional sekolah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam manajemen administrasi pendidikan, yang meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian SDM, pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan dan sistem pengawasan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh. (Ekowati, Sunandar, & Nyoman, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas tentang langkah-langkah strategi pembiayaan manajemen pendidikan dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan diadaptasi dari sumber kemendikna-DBE 1-USAID, pelatihan manajemen berbasis sekolah.

Dari sisi kegiatan, manajemen keuangan pendidikan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan meliputi upaya memperoleh dan menetapkan

sumber sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Hal senada dijelaskan Abdullah (2011;2) mendefinisikan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sebagai kegiatan mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan, dan mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga dicapai maksimalisasi dan efektivitas penggunaan dana atau uang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi. Lebih operasional, Rusmawati, Vivi (2013) menjelaskan uraian kerja dalam kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berupa tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada lembaga pendidikan. Dari uraian di atas, dapat ditarik gambaran umum bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penggalan sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lembaga pendidikan agar organisasi atau institusi pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Sebuah lembaga pendidikan jika dalam pengelolaan pembiayaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak baik intern maupun eksteren dengan baik maka akan membawa dampak yang baik pula terhadap tingkat kepercayaan lembaga pendidikan itu sendiri terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memerhatikan sejumlah prinsip, antara lain, 1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku, 2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan lembaga pendidikan, 3) keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan, 4) transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik, 5) penguatan partisipasi publik atau masyarakat. Di samping itu prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia di atur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan pendapat Singgih dan Rahmayanti, serta Halawa dkk. diperoleh bahwa anggaran pembiayaan dalam pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada mutu pendidikan. Meskipun bukan satu-satunya, anggaran pembiayaan merupakan faktor yang urgent, karena tanpa pembiayaan yang memadai hampir mustahil pendidikan bermutu dapat diwujudkan.

Manajemen pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan beberapa sejumlah prinsip. Dimana pembiayaan atau pendanaan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu dalam menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan kecukupan dan keberlanjutan. (Eva, 2023)

Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Langkah-langkah manajemen pendidikan
1	Ari Proyoga, Arif Risnandi	Perencanaan, analisis, pengeloan, evaluasi
2	Agustian Ramadana Putera, Lisda Aisyah, Misnasanti, Ainun Mahfuzah, dan Syahrial Shaddiq	perencanaan, alokasi, pembukuan, pengawasan, pertanggungjawaban.
3	Jajang Suherman	menerapkan strategi WO atau mendukung strategi <i>defensive</i> yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
4	Budi Budaya	Perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi, Pertanggungjawaban
5	Risma Diana Kosasih Wati Karmila	Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
6	Durotun Nafisah, Widiyanto, Wijang Sakitri	Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
7	Dirgahayu Ari Astuti	perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan
8	Risma Diana Putri Kosasih , Wati Karmila	perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan
9	Endang Tri Ekowati, Sunandar, Ngurah Ayu Nyoman	perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban,

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan *Pertama*, proses perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran RKAS, RAPBS. *Kedua*, Ketika pelaksanaan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. *Ketiga*, Untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel* lembaga pendidikan melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup

kebutuhan lembaga pendidikan dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta didik. *Keempat*, Evaluasi dan pertanggungjawaban dilakukan oleh sekolah melibatkan aktivitas sekolah baik bendahara selaku pelaksana teknis dan juga kepala sekolah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan biaya.

Dalam penyusunan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-

langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan, maka diterapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, antara lain; 1) asas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan, 2) Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan, 3) Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. (Setyorini,2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. 2012. *Pembiayaan pendidikan, perangkat pembelajaran di program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.*
- Arwildayanto,Nina Lamatenggo &Warni Tune Sunar. (2017). *Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan.*
- Budaya,Budi. (2019). *Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang afektif. Likhitaprajna.Bandung*
- Bunyamin.(2022).*Manajemen Pendidikan.Usaha Terpadu. UHAMKA. Jakarta Selatan*
- Diana Risma, & karmila w.*Manajemen pembiayaan pendidikandalam meningkatkan mutu pembelajaran pada MTs Nanjung Mekar rancaekek Bandung.*
- Ekowati Endang.Sunandar & Ngurah Ayu Nyoman.(2019). *Manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah dasar islam ar rahmah. Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP) Eva S, (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru di madrasah tsanawiyah(MTs) Al-Hidayah.Sukajaya Rajabasa Bandar Lampung.Tesis*
- Fattah, Nanang. 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Berbasis Aktivitas Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Lestari, P. (2023). *Manajemen modal manusia (Human Capital Management) dalam pemberdayaan dosen stikes panti rapih Yogya*
- Lestari, P. (2023). *Manajemen modal manusia (Human Capital Management) dalam pemberdayaan dosen stikes panti rapih Yogyakarta. 5(3), 373–388.*
- Prayoga, a., & risnandi, a. (2019). *Manajemen pembiayaan pendidikan madrasah aliyah. Cakrawla: studi manajemen pendidikan islam dan studi sosial, 117-131.*
- Presiden.(2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008.. tentang Pendanaan Pendidikan*
- Rodliyah,(2015).*Manajemen Pendidikan.Jember.IAIN Jember Press.*

Rahmayati.(2020). *Strategi peningkatan portofolio pembiayaan melalui syndicated financing di bank syariah Kota Medan*

Republik Indonesia.(2003).*Undang Nomor RI Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Sherly,dkk.(2020).*Manajemen Pendidikan*.Bandung.Widina Bhakti Persada.

Setyorini, A. A. 2015. Efektivitas Biaya Pendidikan (Bos) SMP Negeri 1 Mojosongo Tahun Ajaran 2014/2015 (Doctoral Dertation,Fakultas Ekonomi Uny)

Shafratunnisa, F. 2016. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir. Siswanto, E. 2013

Undang-undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Penerbit: Citra Umbara Bandung

Zainal Abidin. (2017, 20) *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SMAN 1 Tenjolaya Bogor*.